

PENINGKATAN MUTU SEKOLAH DASAR MELALUI EDS

Subangun

FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: pak.b.jozz@gmail.com

Laily Isroin

FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Email: lailyisroin@ymail.com

ABSTRACT

This study aims to provide an overview of the application of EDS as an effort to improve the quality of primary schools. This research was conducted in Ponorogo District with elementary school research object and elementary school operator in UPTD Jenangan District and UPTD Pulung District. The approach used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used are (1) interview, (2) observation, and (3) documentation. The data analysis used is a qualitative technique, namely to examine the problem on a case by case basis because the researcher believes that the nature of a problem one will be different from the nature of the other problem.

The results showed that school self-evaluation became an alternative for schools to improve school quality. With school self-evaluation, school strengths and weaknesses are known. Furthermore, with the school self-evaluation, will be known position of school accreditation.

Keywords: *School Self Evaluation, Improvement, School Quality*

Submit: 12 September 2017

Accepted: 12 Oktober 2017

Publish: 26 Juni 2018

PENDAHULUAN

Pada Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dapat dicapai jika Kepala sekolah melakokan kepemimpinannya secara efektif. Oleh sebab itu maka kepemimpinan yang menjadi perhatian utama, oleh para praktisi dan akademisi. Hal ini disebabkan karena para pemimpin organisasi termasuk di sekolah memiliki posisi sentral dalam menggerakkan seluruh komponen atau sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Pandangan yang lebih tegas mengenai pentingnya peran kepemimpinan dalam rangka pencapaian kinerja organisasi, berbicara tentang kinerja organisasi dalam hal ini sekolah tidak lain sesungguhnya adalah pencapaian visi organisasi tersebut, pencapaian visi sekolah sesungguhnya adalah kinerja sekolah tersebut. Mulyasa (2005: 97)

menegaskan bahwa "Kepala sekolah dalam mewujudkan visi sekolahnya perlu ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah dalam menjalankan roda kepemimpinannya."

Mutu pendidikan di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Di luar berbagai prestasi akademis yang dicapai siswa-siswa Indonesia di berbagai lomba ilmiah tingkat dunia, kita masih harus mengakui bahwa masih sangat banyak sekolah yang kondisi sarana prasarana dan proses pembelajarannya masih jauh dari memuaskan. Untuk itu, peningkatan mutu pendidikan masih merupakan salah satu program utama yang menjadi fokus perhatian Kementerian Pendidikan Nasional dan menjadi 'pekerjaan rumah' Pemerintah. Sesungguhnya sudah cukup banyak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, khususnya pendidikan tingkat dasar dan menengah.

Peningkatan mutu di sekolah sangat penting untuk menciptakan generasi emas yang mendukung peningkatan daya saing masyarakat menuju bangsa Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Oleh karena itu diperlukan satuan pendidikan yang memiliki mutu layanan pendidikan yang unggul, berstandar, dan berbudaya mutu serta menjamin lulusan yang berkualitas.

Budaya mutu sekolah, secara umum dapat diartikan sebagai kondisi dinamis yang berhubungan dengan proses dan hasil belajar yang memenuhi atau melebihi standar, sehingga berdampak pada kepuasan pelanggannya, khususnya siswa dan orang tua. Dengan kata lain sekolah yang bermutu adalah sekolah yang sesuai kriteriastandar, seperti yang tercantum dalam SPM dan SNP, sehingga dapat memuaskan pelanggannya, baik pelanggan internal maupun eksternal. Sedangkan, budaya dapat diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, suatu yang sudah berkembang, sesuatu yang menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Dengan demikian budaya mutu sekolah dapat diartikan sebagai sekolah yang memiliki adat istiadat atau kebiasaan memenuhi atau melebihi standar dalam pelaksanaan proses dan hasil belajar.

Budaya mutu tidak lahir tiba-tiba tapi harus melalui proses pengembangan yang sistematis dan terarah. Salah satu proses budaya mutu yaitu melalui pemanfaatan hasil EDS dalam rencana

pengembangan sekolah atau rencana kerja sekolah. Proses pengembangan budaya mutu di sekolah ini paling tidak dilakukan melalui tiga tahapan pokok, yaitu tahap konsolidasi, tahap implementasi, dan tahap penguatan. Dalam tahap konsolidasi sekolah melakukan pengembangan program kerja dan pengembangan unit atau dokumen mutu. Sementara dalam tahap implementasi sekolah melakukan proses pemenuhan mutu dan pendampingan pemenuhan mutu. Hal ini akan lebih baik lagi jika dilakukan evaluasi internal maupun eksternal. Sedangkan, tahap penguatan merupakan peningkatan standar mutu, pemenuhan mutu, pendampingan pemenuhan mutu dan evaluasi eksternal. Ketiga tahapan tersebut dapat dirancang dalam kurun waktu tertentu, sesuai dengan kondisi nyata sekolah.

Untuk mendukung proses dan langkah-langkah dalam mengembangkan budaya mutu sekolah, pengawas sekolah dan kepala sekolah dituntut untuk terus mengadakan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Selanjutnya, budaya peningkatan mutu pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik bila sekolah terbiasa melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) dalam implementasi MBSnya. Dan, instrumen utama dalam pelaksanaan SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Dalam implementasinya, EDS akan ditindaklanjuti dengan program Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD) yang dilaksanakan oleh para Pengawas Pendidikan. MSPD merupakan instrumen utama Evaluasi Diri Kota/Kabupaten (EDK) sebagai dasar penyusunan program peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut. Dengan demikian, SPMP, yang diimplementasikan dalam kegiatan EDS, akan menjadi komponen utama dalam lingkup implementasi MBS sebagai upaya pembudayaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

Terlaksananya MBS sangat ditentukan oleh 3 (tiga) pilar utama, yaitu (1) transparansi dan akuntabilitas publik, (2) peran serta masyarakat, dan (3) PAKEM, pembelajaran yang berorientasi pada upaya bagaimana siswa aktif sebagai subyek (bukan objek) pembelajaran dan senang belajar. Yang menjadi pertanyaan krusial saat ini adalah bagaimana upaya sekolah agar terjadi akuntabilitas

publik yang sehat sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat membudaya di dalam aktivitas keseharian sekolah. Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini ditulis untuk mendiskusikan implementasi pilar utama implementasi MBS yaitu pilar ke 1 dan 2 yang terkait dengan transparansi/akuntabilitas publik dan peran serta masyarakat dalam bentuk implementasi SPMP melalui EDS dan MSPD.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dan sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data dari hasil wawancara kepada informan, dan data-data lainnya berupa dokumentasi arsip-arsip serta foto-foto yang menunjang data utama. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipan, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif ini dilakukan secara wawancara. Aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini adalah koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah simpulan. Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu uji kredibilitas yang dengan memperpanjang masa penelitian (observasi), meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan, triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan EMI sekolah dasar dimulai dari kegiatan need assessment SNP sekolah dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara benar tentang standar nasional pendidikan sekolah dasar. Kegiatan dilakukan peneliti bersama dengan beberapa pakar pendidikan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif standar nasional pendidikan sekolah dasar. Hasilnya berupa rekomendasi dari tim pakar untuk menggunakan instrumen akreditasi sekolah dasar yang dikeluarkan BAN-S/M.

Kegiatan kedua adalah perumusan instrumen dan penyusunan indikator SNP SD. Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pakar dilakukan perumusan indikator standar nasional pendidikan sekolah dasar dengan mengacu kepada Perangkat Akreditasi SD/MI dan Juknis SD yang dikeluarkan BAN-S/M. Selanjutnya, berdasarkan indikator standar nasional pendidikan sekolah dasar yang telah dirumuskan, tim menyusun instrumen berupa jabaran capaian menjadi tujuh kriteria capaian.

Kegiatan ketiga adalah pengumpulan data, observasi, dan rekapitulasi data. Kegiatan lapangan ini dimulai dengan sosialisasi indikator dan instrumen yang telah tersusun kepada seluruh pengawas SD. Dalam sosialisasi peneliti menyampaikan tujuan dan target yang akan dicapai; menyamakan persepsi terhadap penggunaan Evaluasi Diri SD Model EMI; serta menetapkan sekolah yang dipilih sebagai sampel dalam uji coba penggunaan Evaluasi Diri SD Model EMI. Selanjutnya, dilakukan uji coba dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam EDS SD di 15 sekolah dasar sampel. Pihak-pihak yang terlibat dalam uji coba Evaluasi Diri SD Model EMI adalah sebagai berikut:

1. Admin Sekolah Dasar

Tugas admin adalah mengisi program aplikasi Evaluasi Diri SD Model EMI.

2. Kepala Sekolah

Tugas kepala sekolah adalah menyampaikan capaian dan target satu tahun mendatang serta rencana dan program perbaikan terhadap estandar yang masih rendah.

3. Pengawas

Tugas pengawas adalah mendampingi dan memberikan arahan terkait berbagai regulasi pemerintah.

4. Pendamping

Tugas pendamping adalah memfasilitasi penggunaan program aplikasi Evaluasi Diri SD Model EMI serta membantu admin apabila ada kesulitan dalam penggunaan program aplikasi.

5. Peneliti

Tugas peneliti adalah mengarahkan pada target yang akan dicapai dalam kegiatan serta menghimpun hasil uji coba.

Bersamaan pengumpulan data dilakukan observasi lapangan sebagai langkah untuk klarifikasi keabsahan data. Selanjutnya, dari data yang diperoleh dilakukan rekapitulasi hasil pengumpulan data. Rekapitulasi data difokuskan pada ketercapaian masing-masing indikator standar nasional pendidikan sekolah dasar. Setelah data berhasil direkapitulasi akan dilakukan penghitungan jumlah indikator SNP yang telah dan belum terpenuhi.

Berdasarkan pelaksanaan uji coba, dengan waktu relatif cepat dapat diketahui:

1. Capaian status akreditasi sekolah.
2. Capaian per standar sehingga standar mana yang harus diperbaiki.
3. Nilai akreditasi yang dicapai

Berdasarkan hasil uji coba Evaluasi Diri Sekolah Dasar Model EMI, kepala sekolah dan admin sekolah mendapat manfaat yang besar karena mereka dengan mudah menetapkan rencana perbaikan. Rencana perbaikan ini lebih terfokus karena berdasarkan capaian per standar. Dalam program aplikasi Evaluasi Diri Sekolah Dasar Model EMI telah disediakan kolom untuk melakukan rencana perbaikan berdasarkan akar penyebab ketidaktercapaian ataupun akar penunjang keberhasilan. Di samping itu, sekolah dengan mudah membuat rekomendasi berdasarkan rencana perbaikan, baik rekomendasi internal maupun eksternal. Rekomendasi internal adalah rekomendasi yang akan dilakukan sekolah sendiri dalam jangka pendek dan jangka panjang. Adapun rekomendasi eksternal adalah rekomendasi yang akan ditujukan kepada Dinas Pendidikan atau masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Sementara itu, berdasarkan survei kepuasan terhadap penggunaan program aplikasi Evaluasi Diri Sekolah Dasar Model EMI dapat diketahui bahwa

1. Petunjuk pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI jelas, mudah dipahami (84%);

2. Pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI termasuk mudah (80%);
3. Waktu pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI cepat, empat jam selesai (88%);
4. Hasil Evaluasi Diri SD Model EMI akurat, sesuai keadaan yang sesungguhnya (80%);
5. Isi Evaluasi Diri SD Model EMI sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan SD (84%);
6. Personil dalam pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI sedikit (68%);
7. Akses pemerolehan hasil Evaluasi Diri mudah (72%);
8. Evaluasi Diri SD Model EMI sangat bermanfaat (80%) bagi sekolah;
9. Pendamping dalam pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI sangat ramah (76%);
10. Pendamping dalam membantu pengisian Evaluasi Diri SD Model EMI sangat mampu (52%).

A. Kendala Pengisian EDS di SD

Dalam temuan penelitian kendala dalam penerapan EDS Model EMI meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi berjalannya proses EDS tersebut. Untuk faktor pendukung terjadinya pelaksanaan EDS SD di Kabupaten Ponorogo antara lain adanya koordinasi yang baik antar stakeholder, hubungan kerjasama dan rasa kekeluargaan yang tinggi antarwarga sekolah, motivasi yang cukup besar dari seluruh komponen sekolah dan antusiasme warga sekolah.

Ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (Agustino, 2008:149), terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

Untuk faktor pendukung koordinasi yang baik antarpemangku sekolah dan hubungan kerjasama dan rasa kekeluargaan yang tinggi antar warga sekolah sejalan dengan teori implementasi dari George C. Edward III poin pertama yaitu komunikasi. Sedangkan faktor antusiasme warga sekolah sejalan dengan teori George C. Edward III poin kedua yaitu sumberdaya.

Keberhasilan implementasi atau pelaksanaan suatu program seperti program EDS dapat diukur dari beberapa faktor. Menurut Agustino (2008: 139) dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output). Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Merrile Grindle (Agustino, 2008: 139) sebagai berikut: Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah melaksanakan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain: kurangnya pemahaman guru, banyaknya pertanyaan pada instrumen, kejenuhan yang dialami para responden dalam pengisian instrumen, serta waktu untuk mengisi instrumen sangat singkat.

Berdasarkan temuan penelitian, untuk mengatasi beberapa hambatan di atas perlu dilakukan: (a) mengintensifkan sosialisasi kepada guru-guru, (b) melakukan pendampingan dan pendekatan kepada guru-guru saat pengisian instrumen, (c) memotivasi guru supaya bersemangat dalam mengisi instrumen EDS.

B. Dampak Penerapan EDS dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Dalam temuan penelitian tentang dampak penerapan EDS dalam peningkatan mutu antara lain mempermudah dalam penetapan RKS/RKAS, memudahkan untuk mengidentifikasi kelemahan serta kelebihan suatu sekolah, dapat meningkatkan kinerja sekolah sesuai dengan 8 SNP, dapat merencanakan program pengembangan sekolah berikutnya dan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, EDS ini sangat membantu dalam mengidentifikasi keberhasilan sekolah dalam pencapaiannya berdasarkan SPM dan 8 SNP.

Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sanders dan Sullins dalam bukunya yang berjudul *Evaluating School Program* (2006:3) manfaat dari evaluasi sekolah adalah: As a result of sound program evaluation, benefits that can accrue to students might include improvement of educational practices and procedures or development of support materials to eliminate curricular

weaknesses. benefits to teachers might include recognition and support for teachers associated with a good program or help in choosing the best curriculum materials. benefits to principals might include direction in setting priorities for school improvement or the identification and justification of needs for new programs. Artinya hasil evaluasi program dapat bermanfaat bagi seluruh warga sekolah. Manfaat yang dapat dinikmati oleh siswa adalah perbaikan praktik dan prosedur atau pengembangan bahan bantuan pendidikan untuk mengurangi kelemahan kurikulum. Manfaat bagi guru adalah pengakuan dan dukungan bagi para guru yang terkait dengan program yang baik atau membantu dalam memilih materi kurikulum terbaik. Manfaat bagi kepala sekolah adalah mengarahkan dalam menetapkan prioritas untuk perbaikan sekolah atau identifikasi dan justifikasi kebutuhan untuk program baru yang selanjutnya.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat kita jabarkan beberapa dampak penerapan program EDS antara lain (a) mempermudah sekolah dalam pembuatan RKS/RKAS dan (b) mempermudah sekolah untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan akan kinerja sekolah, kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dikembangkan serta tantangan yang akan dihadapi sekolah. Manfaat yang dapat diambil antara lain (a) sekolah dapat memiliki data dasar guna pengembangan dan peningkatan mutu di masa yang akan datang, (b) hasil EDS dipergunakan sekolah untuk mendorong sekolah memperbaiki dan meningkatkan mutu serta kinerja sekolah dan (c) dapat mengidentifikasi jenis dukungan yang dibutuhkan oleh sekolah. Dan tindak lanjut hasil EDS untuk pengembangan sekolah di masa datang antara lain sebagai berikut: (a) berdasarkan Standar isi, pengembangan kurikulum yang melibatkan guru, komite sekolah, kepala sekolah, konselor, dan pihak-pihak yang terkait. (b) Standar

proses, pengembangan RPP, silabus dan proses pembelajaran yang bermutu. (c) Standar kompetensi lulusan, peningkatan siswa memperoleh pengalaman belajar agar mendapatkan pengetahuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. (d) Standar PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan), meningkatkan jumlah guru yang memiliki sertifikat

kompetensi dan mempertahankan jumlah guru yang mempunyai kualifikasi minimal. (e) Standar sarpras, peningkatan bangunan sesuai ketentuan SNP dan peningkatan kelengkapan laboratorium, ruang guru dan ruang kelas. (f) Standar pengelolaan, mempertahankan sekolah memiliki dokumen RKS/RKAS (Rencana Kegiatan Sekolah/Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) dan mempertahankan sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah kepada semua warga sekolah. (g) Standar pembiayaan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam rapat penetapan besaran pembiayaan yang ditanggung orang tua murid dan (h) Standar penilaian, mempertahankan hasil penilaian digunakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan diantaranya yaitu: (1) perencanaan atau persiapan, (2) pengumpulan informasi, (3) pengorganisasian dan analisis data, (4) pelaporan.
2. Faktor pendorong pelaksanaan EDS secara internal adalah (1) SDM; (2) koordinasi antarstakeholder; (3) komunikasi dan rasa kekeluargaan antarwarga sekolah, secara eksternal adalah dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan motivasi dari LPMP. Faktor penghambat secara internal adalah (1) kejenuhan terhadap instrumen EDS; (2) singkatnya waktu; (3) kurangnya pemahaman guru, secara eksternal adalah (1) perubahan sistem dan instrumen EDS dan (2) banyaknya pertanyaan pada instrumen.
3. Dampak EDS antara lain (a) mempermudah sekolah dalam pembuatan RKS/RKAS dan (b) mempermudah sekolah untuk mengidentifikasi kekurangan, kelebihan akan kinerja sekolah, kekuatan yang dimiliki sekolah untuk dikembangkan serta tantangan yang akan dihadapi sekolah. manfaat EDS antara lain (a) sekolah dapat memiliki data dasar guna pengembangan dan peningkatan mutu di masa yang akan datang, (b) hasil EDS dipergunakan sekolah untuk

mendorong sekolah memperbaiki dan meningkatkan mutu serta kinerja sekolah. Tindak lanjut sekolah berdasarkan hasil EDS adalah perbaikan, peningkatan dan pengembangan kinerja sekolah sesuai 8 SNP.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini kepada:

1. Kepala Sekolah Dasar

Kepala sekolah diharapkan lebih memotivasi para komponen sekolah untuk mensukseskan pelaksanaan program EDS dan selain mengawasi serta mengatur, kepala sekolah diharap ikut terjun langsung mengawasi proses EDS tersebut.

2. TPS atau Tim EDS

Tim EDS diharapkan lebih mengkoordinasi seluruh komponen sekolah yang terlibat dalam proses EDS dan lebih mengintensifkan sosialisasi EDS kepada seluruh warga sekolah agar dapat meminimalisir kesalahan yang terjadi saat pelaksanaan EDS. Serta diharapkan mengevaluasi kerja tim setelah program terlaksana.

3. Pengawas Sekolah

Pengawas sekolah diharapkan lebih sering datang ke sekolah untuk mengawasi proses berjalannya program EDS dan diharapkan lebih membangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku sekolah agar proses EDS berjalan dengan lancar.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan lebih intensif dalam memberikan sosialisasi kepada sekolah, bersifat terbuka dan membantu saat sekolah mengalami kesulitan dalam proses EDS serta lebih meningkatkan komunikasi dengan sekolah agar tidak terjadi miss-communication.

5. LPMP

Untuk LPMP diharapkan lebih komunikatif dan lebih memotivasi para pengawas dan kepala sekolah saat memberikan sosialisasi pengisian instrumen EDS dan selalu mengevaluasi kembali setelah selesai melakukan sosialisasi agar meminimalisir kesalahan.

6. Peneliti Lain

Untuk peneliti lain diharapkan penelitian ini menjadi bahan referensi dan informasi dalam melakukan penelitian dibidang yang sama yaitu Evaluasi Program Pendidikan dan Analisis Kebijakan. Dan semoga penelitian ini dijadikan bahan pustaka dalam mengerjakan laporan dan peneliti berharap agar mengembangkan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi dan Carolyn D Safrudin. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*; Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Sanders, James R dan Carolyn D Sullins. 2006. *Evaluating School Programs An Educator's Guide; Third Edition*. California: Corwin Press.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tim Penyusun. *Panduan Evaluasi Diri Sekolah untuk Penjaminan Mutu Pendidikan*. Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.